

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi kuat dengan topik kinerja organisasi publik dan manajemen perparkiran. Peneliti menggunakan lima penelitian terdahulu sebagai acuan komprehensif, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. penelitian yang dilakukan oleh M. Wafiq Mahbubi (2024) dalam tesisnya yang berjudul “Strategi Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Parkir Liar di Kabupaten Bojonegoro”. Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis strategi organisasi menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah parkir liar di Bojonegoro salah satunya dipicu oleh sistem pembayaran manual yang rentan akan praktik pungutan liar, sehingga masyarakat cenderung memilih parkir di tempat yang tidak resmi. Mahbubi menekankan bahwa kinerja pelayanan akan meningkat secara signifikan apabila Dinas Perhubungan melakukan akselerasi digitalisasi melalui sistem e-parking di titik-titik krusial perkotaan.
- b. Penelitian studi yang disusun oleh Lase, Widodo, dan Radjikan (2024) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran dalam Meminimalisir Parkir Liar”. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam aspek evaluatif kinerja kebijakan. Temuan lapangan mengungkap

bahwa implementasi kebijakan perparkiran seringkali terbentur pada hambatan struktural, yaitu minimnya kuantitas personel yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa kinerja Dinas Perhubungan sangat dipengaruhi oleh variabel eksternal, yakni rendahnya budaya hukum masyarakat yang tetap melanggar marka jalan meski rambu larangan parkir telah terpasang dengan jelas.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Munadi, Budiman, dan Hasbiyah (2024) berjudul “Kinerja Dinas Perhubungan dalam Penertiban Parkir Liar (Studi Kasus Pasar Induk)”. Penelitian ini secara spesifik membedah kinerja dari dimensi responsivitas dan kualitas layanan. Hasil pembahasan menunjukkan adanya fenomena "pembiaran" yang tidak disengaja akibat pola kerja petugas yang cenderung bersifat reaktif—yakni hanya bergerak saat ada pengaduan masyarakat—daripada bersifat preventif melalui patroli berkala. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi peneliti bahwa kinerja tidak hanya diukur dari hasil akhir penertiban, tetapi juga dari konsistensi kehadiran aparaturnya di ruang publik.
- d. karya ilmiah dari Arma, Syahfitri, dan Simon (2023) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar”. Penelitian ini menyoroti dilema antara pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang eksponensial dengan stagnasi penyediaan lahan parkir resmi oleh pemerintah daerah. Peneliti menemukan bahwa kinerja Dinas Perhubungan seringkali dinilai negatif

oleh publik bukan karena kurangnya kemauan kerja, melainkan karena keterbatasan daya dukung fasilitas (sarana dan prasarana) seperti ketersediaan mobil derek dan area penampungan kendaraan yang terjaring razia, yang pada akhirnya melemahkan wibawa penegakan aturan.

- e. penelitian oleh Rusnaedi (2022) dengan judul “Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum”. Penelitian ini memberikan perspektif sosiologis mengenai interaksi antara petugas dan juru parkir liar. Rusnaedi menemukan bahwa hambatan terbesar dalam meningkatkan kinerja penertiban adalah adanya resistensi dan konflik sosial dari kelompok-kelompok lokal yang menggantungkan hidupnya dari parkir liar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang hanya mengandalkan pendekatan koersif (kekerasan/tekanan) cenderung gagal, sehingga diperlukan pendekatan humanis dan pemberdayaan melalui pembinaan juru parkir agar masuk ke dalam sistem resmi daerah

Tabel 1
PENELITIAN TERDAHULU

No	NAMA DAN TAHUN PENULISAN	METODE PENELITIAN	VARIABEL& INSTRUMEN	HASIL DAN PEMBAHASAN
1.	M. Wafiq Mahbubi (2024) “strategi Dishub dalam meningkatkan pelayanan Pakir liar di Kab Bojonegoro”	Kualitatif Deskriptif	Variabel: Strategi PelaayananInstrumen: Wawanara, observasi, dokumentasi, Analisis SWOT.	Belum adanya e parking membuat warga memilih parkir liar untuk menghindari pungli. Strategi yang disarankan adalah digitalisasi parkir di titik titik krusial Hasil penelitian mengungkapkan bahwa salah satu akar permasalahan maraknya parkir liar di Bojonegoro adalah belum diterapkannya sistem e-parking (parkir elektronik). Ketidakadaan sistem digital ini membuat masyarakat cenderung memilih jasa parkir liar guna menghindari praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, strategi utama yang direkomendasikan kepada pihak Dinas Perhubungan adalah percepatan digitalisasi sistem perparkiran, khususnya pada titik-titik krusial yang memiliki kepadatan kendaraan tinggi.

(Sumber: data diolah peneliti, 2026)

2.	Lase,Widodo& Radjikan (2024) “ Evaluasi Kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam meminimalisir Parkir Liar	Kualitatif Deskriptif	Variabel: Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, kecukupan	Kinerja Belum Optimal karena lemahnya pengawasan dan kurangnya personel lapangan serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap marka jalan Temuan lapangan menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan perparkiran masih belum optimal. Hal ini dipicu oleh lemahnya fungsi pengawasan dari instansi terkait serta keterbatasan kuantitas personel lapangan. Selain kendala internal pemerintah, faktor eksternal juga turut memperkeruh kondisi, yakni masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan serta marka jalan yang berlaku.
----	---	-----------------------	--	--

(Sumber: data diolah peneliti, 2026)

3.	Munadi, Budiman, Hasbiyah (2024) “ kinerja Dishub dalam Penertiban Parkir liar(studi kasus pasar induk)	Kualitatif	Variabel: Kinerja Organisasi (produktifitas, kualitas, Responsivitas) Instrumen: wawancara & dokumentasi	Kinerja dinilai kurang maksimal karena petugas cenderung menunggu laporan masyarakat daripada melakukan patroli rutin Hasil analisis menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di kawasan pasar induk dinilai belum maksimal. Kendala utama yang ditemukan adalah pola kerja aparat penertib yang cenderung pasif, di mana petugas lebih sering menunggu adanya laporan atau aduan dari masyarakat (reactive approach) daripada melakukan tindakan pencegahan melalui patroli rutin secara berkala di lapangan (proactive approach).
----	--	------------	---	---

(Sumber: data diolah peneliti, 2026)

4.	Arma, Syahfitri & Simon (2023) “implementasi kebijakan dishub dalam menanggulangi parkir liar	Kualitatif deskriptif	Variabel: Kinerja Organisasi Instrumen: wawancara & dokumentasi	Masalah utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan yang tumbuh cepat dengan ketersediaan lahan parkir resmi dan jumlah personel penertib Penelitian ini mengidentifikasi bahwa masalah mendasar dalam implementasi kebijakan adalah adanya disproporsi atau ketidakseimbangan struktural. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir resmi yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya rasio jumlah personel penertib dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dipantau.
----	--	-----------------------	--	---

(Sumber: data diolah peneliti, 2026)

5.	Anugrah Diastuti dan Rissa Ayyustia (2026)	Kualitatif deskriptif	Variabel :strategi penanggulangan Instrumen: observasi lapangan dan wawancara dengan petugas patroli	Penertiban oleh resistensi juru parkir liar dan kurangnya sanksi tegas yang memberikan efek jera Hasil kajian membuktikan bahwa upaya penertiban parkir liar di tepi jalan umum menghadapi hambatan sosial yang cukup kompleks, berupa adanya penolakan atau resistensi dari oknum juru parkir (jukir) liar. Selain itu, belum hadirnya sanksi hukum yang tegas dan konsisten menyebabkan tindakan penertiban yang dilakukan selama ini belum mampu memberikan efek jera (deterrent effect) bagi para pelanggar.
----	---	-----------------------	---	--

(Sumber: data diolah peneliti, 2026)

B.Landasan Teori

1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah prestasi kerja yang dicapai oleh seorang karyawan secara kualitas maupun kuantitas sesuai tugas yang diberikan dan waktu yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan selama periode tertentu berdasarkan ketentuan dan kesepakatan perusahaan, diukur dengan dimensi: kualitas kerja, kerja sama, tanggung jawab, dengan indikator ketelitian, kehandalan, kecepatan waktu, kepuasan kerja, jejalinan kerja sama, kekompakan, tanggung jawab dalam mengambil keputusan memanfaatkan sarana prasarana (Mangkunegara, 2024)

Menurut Kasmir (2023) kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Kalimat di atas mengandung makna kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam suatu periode tertentu

Indikator kinerja menurut Kasmir adalah:

1. Kualitas (mutu)
2. Kuantitas (jumlah)
3. Waktu (jangka waktu)
4. Penekanan biaya
5. Pengawasan
6. Hubungan antar karyawan

Adanya peningkatan dan penurunan kinerja pada karyawan sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kinerja adalah suatu

hasil pekerjaan yang memiliki hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi Armstrong and Baron (2022). Maka dari itu, diperlukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan selama berada dalam perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Armstrong & Baron (2022), antara lain: (1) personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu; (2) leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer; (3) team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja; (4) system factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan instansi; (5) contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

2. Kinerja Organisasi Publik

Dalam organisasi pengukuran sebuah kinerja (*performance measurement*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dari sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung-jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi,

yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Setiap organisasi dibentuk atau didirikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama untuk mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut telah dicapai. Perlu dilakukan penilaian evaluasi secara terus menerus terhadap organisasi, dapat melakukan perbaikan terus menerus. (Donald Van Meter dan Carl Van Horn, 2025). Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum.

Sementara itu (Dalam Pedoman Penerapan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterbitkan oleh LAN di Jakarta pada tahun 2002), Kinerja diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Dari berbagai definisi kinerja organisasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi ialah hasil yang ditunjukkan oleh sebuah organisasi atau tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut.

Kinerja pegawai/organisasi sebagai kemampuan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator yang dikemukakan meliputi:

1. Produktivitas: bukan sekedar jumlah hasil kerja tetapi bagaimana efisiensi penggunaan sumber daya(personel,anggaran,waktu) dalam mencapai target penertiban parkir
2. Kualitas layanan: seberapa baik proses penertiban dilakukan. Apakah petugas bersikap profesional
3. Responsivitas: kemampuan Dishub dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan merespons keluhan terkait parkir liar dengan cepat.
4. Responsibilitas: sejauh mana pelaksanaan penanggulangan parkir liar tersebut sesuai dengan prinsip prinsip administrasi yang benar dan kebijakan organisasi (SOP)
5. Akuntabilitas: sejauh mana kebijakan dan tindakan penertiban tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepada publik baik secara hukum maupun moral. (Sinambela 2017:137)

Mahsun (2016:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi, dan visi organisasi. Mahsun menjelaskan bahwa kinerja sektor publik dapat di ukur melalui beberapa elemen kunci:

1. Masukan(*input*): segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan penertiban berjalan(SDM,anggaran operasional,kendaraan derek)

2. Proses(*process*): tingkat efisiensi dalam prosedur kerja. Bagaimana alur penetiban dilakukan dengan patroli hingga penindakan.
3. Keluaran(*output*): hasil langsung dari kegiatan
4. Hasil(*outcome*): dampak jangka menengah dari output(berkurangnya tingkat kemacetan di area fasilitas publik Kab Bojonegoro
5. Manfaat(*benefit*): nilai tambah yang dirasakan masyarakat.
6. Dampak(*impact*): pengaruh jangka panjang terhadap perubahan perilaku masyarakat dan ketertiban kota secara umum.

3. Parkir

Secara umum parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir didefinisikan sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan bermotor, memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan, atau aktivitasnya. Pembangunan sejumlah gedung, atau tempat-tempat kegiatan umum, sering kali tidak menyediakan area parkir yang cukup, sehingga berakibat pada sebagian lebar badan jalan dipergunakan untuk parkir kendaraan (Warpani, 1990).

Parkir merupakan kebutuhan tersendiri (*derived demand*) dari setiap perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Artinya, setiap perjalanan pasti dimulai dari tempat parkir dan berakhir di tempat parkir lainnya.

Menurut Tamin (2000), Ofyar Z. Tamin, seorang pakar transportasi terkemuka di Indonesia, menekankan bahwa parkir adalah bagian statis dari sistem transportasi. Setiap perjalanan kendaraan selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Oleh karena itu, fasilitas parkir harus dipandang sebagai komponen infrastruktur jalan yang memengaruhi kapasitas jalan secara keseluruhan. Miro (2012/2017): Fidel Miro mendefinisikan parkir sebagai keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Ia menekankan aspek ruang dan waktu, di mana parkir adalah penggunaan ruang milik jalan (atau lahan khusus) untuk durasi tertentu yang harus dikelola agar tidak mengganggu arus lalu lintas utama

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No. 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bojonegoro, Dishub menggunakan dasar hukum lokal ini untuk melakukan penindakan. Parkir didefinisikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan di luar badan jalan atau di tepi jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

1. Jenis Jenis Parkir

Menurut Warpani (2002), fasilitas parkir pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan lokasinya, yaitu parkir di badan jalan (on-street parking) dan parkir di luar badan jalan (*off-street parking*).

a. Parkir di Badan Jalan (*On Street Parking*)

Fasilitas Parkir yang menggunakan tepi jalan. Jika tidak di atur dengan baik (tanpa rambu atau marka) jenis ini sering digunakan sebagai penyebab utama kemacetan di fasilitas publik seperti pasar atau stasiun di Bojonegoro Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karena, parkir memanfaatkan badan jalan, mengurangi lebar manfaat jalan, sehingga dapat mengurangi arus lalu lintas, dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa kendaraan saja yang parkir di badan jalan, tetapi kendaraan tersebut secara efektif telah mengurangi badan jalan. Kendaraan yang parkir di sisi jalan, merupakan faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan, di daerah pertokoan. Hal ini terutama disebabkan karena, berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti, dan atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak

b. Parkir di Luar Badan jalan (*Off Street Parking*)

Fasilitas parkir yang berada diluar ruang milik jalan seperti digedung parkir peralatan parkir rumah sakit atau area parkir khusus dipusat perbelanjaan. Ini adalah solusi untuk menanggulangi parkir liar Secara ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (*off street parking*), harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir. Jarak parkir terjauh ke tempat tujuan tidak lebih dari 300 hingga 400 meter.

Bila lebih dari itu, pemarkir akan mencari tempat parkir lain sebab merasa keberatan untuk berjalan jauh (Warpani,1990).

c. Parkir di tepi jalan(*On Street Parking*)

d. Parkir di luar jalan (*off street parking*)

2. Parkir berdasarkan Status Hukum (Legalitas)

a. Parkir resmi(Legal)

Fasilitas parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui keputusan Bupati atau Peraturan Daerah. Memiliki tanda khusus berupa rambu parkir(huruf Pbiru) marka kotak parkir,dan dikelola oleh petugas resmi (jukir) yang memiliki tugas serta karcis resmi.

b. Parkir liar(ilegal)

Parkir yang dilakukan di lokasi yang tidak ditetapkan sebagai tempat parkir. Statusnya ilegal karena melanggar rambu laangan (S/P di coret) menggunakan trotoar atau dilakukan di badan jalan tanpa izin resmi sehingga menjadi target penertiban Dishub.

3. Parkir berdasarkan status pengelolaan

a. Parkir publik (Milik Pemerintah)

Dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah (Dishub). Berada di pinggir jalan umum (on street) atau lahan milik Pemda dan pendapatannya masuk ke kas daerah sebagai Retribusi Parkir.

b. Parkir Swasta (milik Badan Usaha atau Perorangan)

Dikelola oleh pihak swasta di lahan milik pribadi seperti parkir di Mall, RS Swasta atau pusat perbelanjaan. Pendapatannya dipungut sebagai Pajak Parkir dan bukan dikelola oleh Dishub.

4. Parkir berdasarkan status kepentingan

Menurut Warpani (2002) status parkir juga bisa dilihat dari tujuan penyediaannya:

a. Parkir umum

Disediakan untuk masyarakat luas tanpa memandang urusan tertentu. Siapapun boleh parkir selama membayar retribusi contoh parkir disepanjang jalan protokol Bojonegoro.

b. Parkir khusus

Disediakan untuk orang yang berkepentingan dilokasi tersebut. Contoh parkir khusus pegawai di kantor Pemkab Bojonegoro.

5. Jenis jenis parkir berdasarkan jenis kendaraan

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan area parkir, maka parkir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)

b. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)

c. Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat atau lebih dan bermesin (mobil, taksi, dan lain-lain)

4. Parkir liar

Parkir liar merupakan suatu fenomena di mana kegiatan parkir berdiri secara ilegal atau tidak resmi dengan adanya pengakuan lahan parkir secara sepihak, adapun lahan parkir liar berada diluar pembinaan pemerintah setempat, dengan uang hasil parkir tidak dapat disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah setempat (Viesta, 2019). Sedangkan pada beberapa kawasan tertentu perlu mendapatkan penataan parkir secara khusus, kawasan tersebut antara lain kawasan perniagaan dan perkantoran. Pada kawasankawasan tersebut rentan memiliki kondisi ruas badan jalan yang sempit dan memiliki tingkat arus lalu lintas yang tinggi, sehingga pada kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk menerapkan sistem parkir di tepi jalan atau on street parking dan perlu diterapkan sistem area parkir tertutup atau off street parking karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kemacetan (Yanti, 2017).

Adapun beberapa faktor yang seringkali dijadikan alasan oleh parapelanggar parkir liar antara lain yaitu penuhnya tempat parkir pada lokasi yangmereka kunjungi. Sedangkan dari sisi pengendara berasalan bahwa merekamemiliki jadwal yang padat sehingga tidak memiliki banyak waktu jika harusmenggunakan parkir tertutup atau off street parking. Adapun alasan lainnya yaitu pengendara tersebut menghindari biaya parkir (Rahmawati, 2018). Fenomena parkir liar ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia khususnya kota kota besar dengan jumlah kendaraan yang

seiring waktu meningkat dengan pesat, Kota Jakarta menjadi ibu kota negara di Indonesia yang menghadapi permasalahan parkir liar tersebut

5. Fasilitas Publik

Fasilitas publik adalah sarana, prasarana, atau tempat yang disediakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan untuk kepentingan umum dan digunakan masyarakat guna menunjang aktivitas sehari-hari. Fasilitas ini bertujuan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan aksesibilitas bagi warga, termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas publik merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan daerah. Suatu era pemerintahan dianggap berhasil jika pelayanan fasilitas publik dapat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, ketersediaan fasilitas publik menjadi salah satu indikator *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Suharsimi Arikunto menyatakan Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan sesuatu fasilitas dapat berwujud benda maupun uang, secara garis besar fasilitas dapat dibedakan menjadi dua komponen yaitu, fasilitas fisik dan fasilitas umum (Ngulandari, 2016). Berikut adalah tabel fasilitas publik:

Tabel 2

Tabel identifikasi lokasi Fasilitas Publik dan Potensi Parkir Liar

No	Jenis fasilitas publik	Lokasi spesifik	Karakteristik parkir liar
1.	Transportasi	Stasiun Bojonegoro, terminal rajekwesi	Penjemputan ojek atau kendaraan online di bahu jalan
2.	Perdagangan/jasa	Pasar kota Bojonegoro, kds, bravo	Meluapnya parkir motor atau mobil hingga ke badan jalan pada jam sibuk
3.	Kesehatan	Rsud Dr.Sosodoro Djatikoesumo	Parkir pengunjung yang tidak tertampung di lahan internal
4.	Pusat keramaian	Alun alun Bojonegoro, taman rajekwesi	PKL dan pengunjung saat CFD atau akhir pekan
5.	Pendidikan	Kawasan sekolah di jalan pangsud	Antrean kendaraan penjemput siswa saat jam pulang sekolah
6.	Perkantoran	Area Pemkab Bojonegoro/jl Mastumampel	Kendaraan tamu atau pegawai yang parkir di area terlarang(rambu coret)